

Judul : Lindungi pelaku ekraf, komisi V usulkan UU Pekerja GIG
Tanggal : Kamis, 02 April 2026
Surat Kabar : Pelita
Halaman : 3

Lindungi Pelaku Ekraf Komisi V Usulkan UU Pekerja GIG



Syaiful Huda

WAKIL Ketua Komisi V DPR Syaiful Huda menilai, kasus hukum videografer Amsal Sitepu menunjukkan rapuhnya perlindungan pekerja kreatif. Cara pandang jaksa penuntut umum mencerminkan rendahnya penghargaan serta posisi tawar para pekerja kreatif itu.

Rentanannya posisi Amsal sebagai videografer, menurut Huda, juga dialami pekerja lain seperti kru film, kru panggung, konten kreator, hingga para pengemudi transportasi online. Padahal beberapa tahun terakhir ini, mereka adalah tulang punggung ekonomi nasional. Kontribusi mereka sangat nyata dan cukup besar pada pertumbuhan ekonomi.

Tanpa adanya payung hukum yang jelas, seluruh kerlingat dan pemikiran para pekerja kreatif ini sangat mudah dikriminalisasi oleh pihak tertentu. "Mereka juga rentan dieksploitasi karena standarisasi nilai kerja yang mereka hasilkan selama ini belum diakui secara resmi oleh negara," tetangnya, kemarin.

Kehadiran UU Pekerja GIG, lanjutnya, nantinya akan memastikan status mereka jadi sama dengan pekerja formal lain yang diatur dalam UU Ketenagakerjaan. Meskipun

statusnya jadi jelas, kepastian hukum itu tidak akan menghilangkan unsur fleksibilitas kerja yang selama ini jadi ruh ekosistem ekonomi.

RUU inisiasinya ini juga menjamin kejelasan kontrak kerja, jaminan penghasilan bersih, pengaturan jam kerja, perlindungan sosial, hingga transparansi algoritma. "Negara tidak boleh membiarkan anak muda kreatif terus berada dalam dilema ketidakpastian jaminan perlindungan terhadap profesi yang mereka jalani saat ini," tegasnya.

Sejalan dengan itu, Wakil Ketua Komisi VII DPR Chusnunia Chalim mendorong Kementerian Ekonomi Kreatif (Kemenekekraf) jadi motor utama perlindungan para pekerja di sektor tersebut. Aparat penegak hukum jangan sampai salah menerapkan kebijakan. Pasalnya, itu bisa jadi bumerang bagi pertumbuhan industri kecil serta para pekerja.

Kemenekekraf, kata Chusnunia, harus berperan aktif mendampingi, agar tidak jadi preseden buruk bagi masa depan para pelaku ekonomi kreatif di Tanah Air. Apalagi, Presiden Prabowo Subianto juga sudah berjuang menyejahterakan pekerja kreatif dengan membentuk kementerian tersendiri serta menerbitkan berbagai peraturan Pemerintah yang mendukung.

Sektor ekraf, sambunginya, adalah mesin pertumbuhan baru yang menyumbang nilai produk domestik bruto sekitar Rp 1.500 triliun Rp 1.661 triliun pada 2025. Kontribusi terhadap ekonomi nasional mencapai 7,28 persen. "Makanya keberadaannya harus terus didukung melalui berbagai kebijakan strategis yang berpihak," ingatnya. ■ PYB